

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebelumnya adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dikenal dengan nama Beras Sejahtera (RASTRA) ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi 15kg untuk setiap rumah tangga sasaran penerima manfaat dengan harga RASTRA sebesar Rp.1.600,-/kg dan sejak tahun 2017 program tersebut telah ditransformasikan ke dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada warga yang mendapatkan bantuan setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang biasa disebut dengan ATM dan dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras, minyak goreng dan telur, sesuai jumlah dan kualitas serta pada waktu dan tempat yang diinginkan.

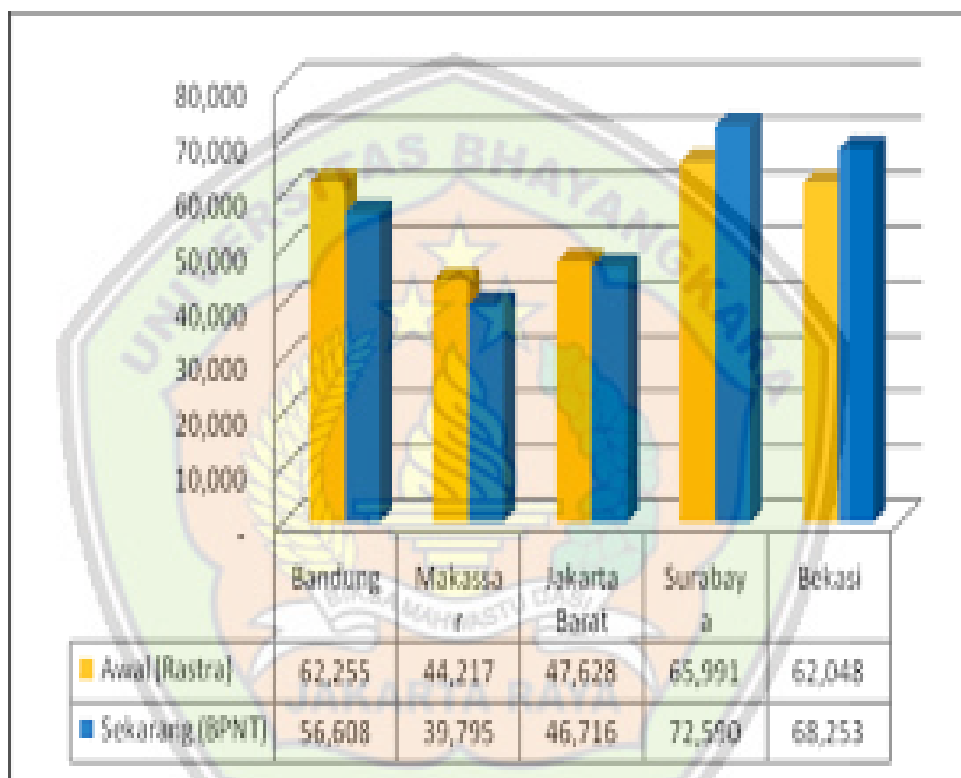
Pemberian bantuan pangan dalam bentuk non tunai diharapkan dapat mendukung perilaku produktif masyarakat, fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan juga dapat memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini muncul atas arahan Presiden tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 Maret 2016 bahwa penyaluran bantuan sosial dan subsidi dilaksanakan secara non tunai, Presiden memberi arahan agar bantuan sosial semakin diintegrasikan secara non tunai dan subsidi pangan akan di konversi lewat bantuan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Presiden Republik Indonesia mengarahkan agar penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal RASTRA yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat mulai diterapkan pada tahun 2017 (<https://www.bni.co.id>) di akses pada 10 April 2019.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat pada saat adanya Beras Sejahtera (RASTRA) adalah masyarakat mendapatkan beras yang berwarna kuning, banyak kotoran, apek dan kualitasnya tidak bagus, selain itu faktor kelemahan lainnya

dari distribusi tidak tepat waktu, pembagian yang tidak tepat sasaran atau penerima tidak terdaftar di Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan fenomena tersebut pemerintah mengeluarkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti Beras Sejahtera (RASTRA). Pemerintah mengganti RASTRA menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selain untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan, juga sebagai salah satu langkah untuk memberikan gizi seimbang serta meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu saat penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Kepedulian Pemerintah tersebut secara khusus dituangkan dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomer 25 tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui E-Warung pada pasal 1 ayat 1 sebagai berikut “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan program serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara”. Peraturan menteri tersebut kemudian menciptakan sebuah inovasi dalam program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Adapun dasar kriteria atau indikator penentuan penduduk miskin antara lain adalah; 1. Luas lantai kurang dari delapan meter persegi per orang, 2. Jenis lantai tanah, 3. Dinding rumah bambu atau kayu berkualitas rendah, 4. Membeli daging maksimal satu kali sepekan, 5. Satu tahun membeli satu setel pakaian baru, 6. Frekuensi makan satu atau dua kali sehari, 7. Tidak mampu berobat ke puskesmas atau poliklinik, 8. Lapangan pekerjaan buruh, 9. Buruh bangunan dan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600 Ribu per bulan, 10. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak tamat sekolah, tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp.500 Ribu, (Data Badan Pusat Statistik BPS). Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Ke-10 indikator tersebut mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pendapatan atau konsumsi atau fisik. Seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum atau garis kemiskinan.

Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang akan disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke beberapa kota terpilih di Indonesia yang dianggap sudah siap akses dan fasilitas memadai untuk melaksanakan program tersebut. Pada tahun 2017, penyaluran dilakukan serentak di 44 kota, yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur (<https://www.detik.com>) diakses pada tanggal 12 Mei 2019.



Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Penerima RASTRA dan BPNT Pada Lokasi Kajian Sebagai Lokasi Pelaksanaan Program BPNT di Indonesia 2017
 Sumber : <https://media.neliti.com>

Beberapa kota yang terpilih untuk di salurkan diantaranya adalah Kota Bekasi, beberapa kelurahan yang mendapatkan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah kelurahan Bekasi Jaya, tidak sedikit masyarakat yang berada di wilayah kelurahan Bekasi Jaya belum paham tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan tidak mengerti cara penukaran sembako dengan kartu yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera

(KKS) dikarenakan sebelumnya masyarakat mengeluarkan uang untuk membeli pangan menggunakan kupon dengan harga yang murah untuk mendapatkan sembako. Mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa penyaluran bantuan pangan yang dahulu berupa bahan-bahan pangan yang murah dan terjangkau sekarang telah ada inovasi keterbaruan dimana bantuan tersebut digantikan menjadi gratis dikarenakan ada bantuan dari pemerintah yang akhirnya kebutuhan masyarakat terbantu setiap bulannya, seperti yang dikemukakan Bapak Tono selaku staf Kelurahan Bekasi Jaya :

“Awalnya mulanya masyarakat dahulunya mengeluarkan uang untuk membelinya menggunakan kupon dengan harga pangan yang murah, adanya perubahan Program Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah kini masyarakat merasa terbantu dengan inovasi membeli pangan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan setiap bulannya seperti beras, gula, minyak goreng yang dibelanjakan di E-Warung secara gratis” wawancara (20/06/2018).

Lebih lanjut Priambodo mengatakan :

“Bila dikatakan sulit, ya sulit sekali untuk menerapkan inovasi program karena masyarakat banyak yang belum paham mengenai program tersebut ketika melakukan penggesekan kartu untuk di tukarkan menjadi sembako. Di saat ada kegiatan penukaran saya tidak pernah bosan untuk memberikan penyuluhan mengenai program BPNT itu namun masyarakat sangat antusias dengan adanya program tersebut karna masyarakat sangat terbantu pangan yang mereka dapatkan” wawancara (09/08/2018).

Brent D. Ruben (dalam Muhammad, 2007: 3) mengemukakan manusia berkomunikasi sebagai suatu proses dimana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, organisasi, masyarakat mengirimkan serta menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya.

Dalam kegiatan penyuluhan proses komunikasi kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan program tersebut berperan besar dalam sistem sosial masyarakat karena mempunyai potensi terhadap perubahan dalam dari individu, kelompok dan masyarakat secara langsung atau tidak. Suatu sistem sosial masyarakat sangat penting dalam rangka upaya untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan, tidak terlepas dari komunikasi kepada masyarakat. Komunikasi pembangunan usaha pemilihan strategi atau model komunikasi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam rangka pembangunan untuk masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jelas dan melakukan penelitian dengan judul *“Difusi Inovasi Dalam Kegiatan Komunikasi Pembangunan (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi 2017-2018)”*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses difusi inovasi dalam kegiatan komunikasi pembangunan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada bagaimana proses difusi dan inovasi dalam kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan masalah dan menjadi pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana proses difusi dan inovasi dalam kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses difusi dan inovasi dalam kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat informasi bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memberikan informasi selanjutnya mengenai bagaimana proses difusi inovasi pada program bantuan pangan non tunai.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan Komunikasi Pembangunan dan dapat menjadi acuan referensi untuk penelitian Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam sebuah program pemerintah.

